

# IDENTIFIKASI PENYEBAB DAN POLA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI WILAYAH KABUPATEN KARANGANYAR

Waluyo

## Abstract

*The aim of the study is revealing the cause factor of the happening of and form the solution model applied to environment dispute occurred in region of Karanganyar. The cause of environment dispute in region Karanganyar, environmental dispute between PT Indo Acidatama Chemical Industry residing in Kemiri Kebakkramat versus some of farmer society in Sroyo and Kemiri (1999-2000) and also environmental dispute between PT Palur Raya residing in Ngringo Jaten versus some of Ngringo society which is merged into by Consortium of Waste Victim (KKL) PT Palur Raya (2000-2002) is the existence of anticipation have the happening of environmental contamination in consequence of have operated [t company ( PT IACI and PT Palur Raya). To solve the dispute between PT Indo Acidatama Chemical Industry residing in Kemiri Kebakkramat versus parts farmer society in Sroyo and Kemiri (1999-2000) with formed its functioning Tim-9 connecting problems faced between company and society. This team give the solution which in character recommend to company and control when needed; while to environmental dispute that happened between PT Palur Raya versus KKL is pass the mechanism of is solving of extrajudicial environment dispute in the form of Environmental Mediasi (mediator: Ir. Agus Gunawan Wibisono). This Mediasi yield the Agreement Mediasi of date of 22 July 2000 and followed with the Independent Team forming.*

**Key Word :** *Environmental Dispute, Settlement*

## A. Pendahuluan

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu wilayah di eks Karesidenan Surakarta yang memiliki kawasan industri terbanyak dibandingkan dengan daerah lainnya. Kabupaten Karanganyar dengan slogan **Intanpari** (Industri, Pertanian dan Pariwisata) banyak berdiri industri. Industri yang ada bergerak di berbagai sektor seperti: tekstil, kulit, kimia, obat (farmasi), kimia, wisata, makanan dan peternakan. Sektor industri selain meningkatkan dan memajukan taraf kehidupan masyarakat, ternyata juga menimbulkan dampak yang negatif bagi kehidupan masyarakat. Dampak tersebut terjadi sebagai akibat beroperasinya industri yang tidak mengindahkan norma-norma yang ada. Bahkan kemungkinan bisa berakibat fatal pada kerusakan lingkungan hidup, sehingga mengganggu proses kehidupan masyarakat.

Di antara dampak negatif dari keberadaan industri atau perusahaan adalah potensi munculnya kasus sengketa lingkungan hidup sebagai akibat pembuangan limbah industri

yang mencemari lingkungan hidup. Bahkan hal ini sering menimbulkan gejolak sosial,

Di wilayah Kabupaten Karanganyar tersebut pernah terjadi kasus-kasus sengketa lingkungan yang terjadi. Dalam delapan tahun terakhir tercatat kasus seperti: sengketa antara PT. Agung Tex dengan penggarap sawah di sekitar pabrik (1997); sengketa antara PT. Manunggal Adipura dengan Warga Kranggansari (1998), sengketa antara PT. Indo Acidatama Chemical Industry dengan sebagian petani di Desa Sroyo (1998), sengketa antara Pengusaha Ternak babi dengan warga sekitar (Desa Sroyo dan Ngringo) di sekitar Sungai Bengawan Solo (1998, 1999 dan 2000) dan sengketa antara PT. Palur Raya dengan warga sekitar yang tergabung dalam Konsorsium Korban Limbah (KKL) PT. Palur Raya tahun 2000-2003.

Munculnya kasus sengketa lingkungan hidup seperti contoh di atas menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta

akan pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sengketa lingkungan hidup yang terjadi biasanya melibatkan masyarakat dengan perusahaan/industri.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) diatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian melalui pengadilan dimaksudkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atas sengketa lingkungan hidup yang terjadi. Pengaturan lebih lanjut mengenai gugatan perdata terdapat dalam Pasal 34 hingga Pasal 39 UUPLH.

## **B. Pengertian Sengketa Lingkungan (Environmental Dispute).**

Secara etimologis peristilahan sengketa lingkungan hidup merupakan gabungan dari dua kata yaitu sengketa dan lingkungan hidup. Arti kata sengketa sendiri adalah permusuhan antara dua pihak karena memperebutkan sesuatu (Dep. P & K, 1997: 1277). Menurut Pasal 1 angka 19 UUPLH sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Jadi sengketa lingkungan hidup menurut pembuat undang-undang ini, tidak saja akibat ditemukan bukti konkrit adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, tetapi adanya secara patut dugaan diketemukannya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup tersebut dapat dijadikan pedoman. Para pihak yang berselisih tersebut dapat dibedakan menjadi pihak yang melakukan (diduga melakukan) pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pihak yang lingkungannya tercemar/terusakkan. Hal ini dapat dikonfigurasi dalam bahasa hukum sebagai pelaku pencemaran/kerusakan (**pencemar/perusak**) lingkungan dan korban

pencemaran-perusakan (**tercemar-terusakkan**) lingkungannya. Subyek sengketa lingkungan dapat berupa orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum (Wijoyo Suparto, 1999:8).

## **C. Penyebab Terjadinya Sengketa Lingkungan**

Sengketa lingkungan hidup diartikan sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2000). Jadi sengketa lingkungan adalah perselisihan atau percekocokan atau konflik antara dua pihak/ subyek hukum atau lebih yang dikarenakan oleh: dugaan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (*potensial*) atau memang karena telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (*factual*). Fokus dari penyebab sengketa ini adalah pencemaran/kerusakan lingkungan dan dugaan terhadapnya. Bentuk-bentuk konflik/ sengketa lingkungan yang sering muncul penyebabnya adalah: (a) pencemaran (terutama pencemaran air dan udara termasuk kebisingan); (b) perubahan tata guna lahan (*land use*); (c) gangguan keamanan dan kenyamanan (*insecure and amenity*) (Sudharto P. Hadi, 2000: 3).

## **D. Penyelesaian Sengketa Lingkungan**

Menurut jenisnya sengketa lingkungan hidup masuk kategori perkara perdata, seperti perkara perdata lainnya sengketa lingkungan hidup pun, proses penyelesaiannya tergantung pada para pihak yang bersengketa. Dikatakan tergantung para pihak, karena dalam hukum perdata teknik/cara penyelesaian perkara perdata pada umumnya dibedakan menjadi dua sistem atau cara yaitu melalui gugatan perdata biasa dan melalui sistem yang disebut Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternatif Dispute Resolution). Gugatan perdata dimaksudkan penyelesaian perkara perdata dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang memutus perkara bersangkutan. Sedangkan yang berkaitan

penyelesaian sengketa lingkungan daitur dalam Pasal 30, 31, 32 dan 33 UUPLH. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan lebih menekankan kepada para pihak yang bersengketa untuk menentukan bentuk yang dipilih atau disepakati untuk dijadikan forum penyelesaian bersama. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subyek yang disengketakan, serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Dalam rangka penggunaan prosedur ini dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 5, 6, 30, 31, 32 dan 33 UUPLH. Pasal 5 dan 6 UUPLH mengatur tentang hak dan kewajiban dari setiap orang (anggota masyarakat) atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pengelolaannya, sedangkan Pasal 31, 32 dan 33 UUPLH adalah mengenai ketentuan dan prosedur beracaranya. Konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) banyak diterapkan, karena mempunyai kelebihan (Violetta, 2000: 3), antara lain :

1. lebih murah, cepat dan sederhana;
2. dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan;
3. kenyataan bahwa pengadilan bukan merupakan pilihan terbaik untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tertentu: sengketa keluarga, sengketa bisnis, sengketa lingkungan hidup dan konflik etnis. Agar terjadi "*win-win solution*" dan menghindari "kalah menang" atau "benar-salah".

Ketentuan pelaksanaan dari pasal-pasal UUPLH yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan serta bentuk dan tatacaranya/prosedur adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUADR) dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa

Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (PPLPJ). Caranya dengan melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi ataupun penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 UUADR). Termasuk dalam kategori ini adalah penyelesaian dengan arbitrase. Dalam teori yang ada penyelesaian yang dimaksud di atas sering diistilahkan sebagai suatu alternatif penyelesaian perkara/sengketa (*alternative dispute resolution*). Wujudnya biasanya berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase (Emirzon, 2001: 39).

## E. Hasil Dan Pembahasan

Penyebab terjadinya sengketa lingkungan yang terjadi di wilayah Kabupaten Karanganyar:

### 1. Sengketa lingkungan antara PT Indo Acidatama Chemical Industry (PT IACI) dengan sebagian masyarakat petani di desa Sroyo dan Kemiri pada tahun 1999-2000

PT IACI adalah salah satu perusahaan yang terletak di wilayah kabupaten Karanganyar yang bergerak di bidang produksi bahan-bahan kimia, yaitu: alkohol, methanol dan acid etanol. Perusahaan ini berdiri tahun 1988, di atas lahan kurang lebih 15 Ha, memiliki sekitar 400 karyawan. Perusahaan ini merupakan yang terbesar di Indonesia untuk perusahaan sejenis. Bahan baku tetes (limbah industri gula/tebu) yang diperoleh dari beberapa kota di sekitarnya, bahkan hingga ke Sumatera. Dengan proses fermentase bahan tetes tersebut diproses menjadi bahan kimia jadi yaitu: alkohol, methanol dan acid etanol. Produksinya dipasarkan dan/atau digunakan untuk mencukupi pasar dalam negeri dan selebihnya dieksport ke negara Jepang, Singapore dan beberapa negara lainnya. Diperkirakan dalam produksi yang optimal limbah cairnya bisa mencapai 10.000 M<sup>3</sup>. Sengketa lingkungan antara PT Indo Acidatama Chemical Industry (PT IACI) dengan sebagian masyarakat di sekitarnya pada tahun 1999-2000 adalah disebabkan oleh adanya dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pencemaran

yang diakibatkan oleh keberadaan limbah cair yang dihasilkan oleh PT IACI. Oleh sebagian masyarakat keberadaan perusahaan telah menimbulkan pencemaran air (sungai dan sumur penduduk); polusi udara (*odor*/bau) dan pencemaran tanah (pertanian) dan menimbulkan beberapa kerugian terhadap masyarakat. Hal ini menurut masyarakat di sekitar perusahaan telah terjadi semenjak kira-kira tahun 1992. Dugaan adanya pencemaran tersebut oleh sebagian masyarakat di sekitar perusahaan dibuktikan dengan misalnya: (1) keruhnya (warna coklat pekat) air sungai Sroyo; (2) timbulnya gejala gatal-gatal yang dirasakan oleh sebagian masyarakat yang menggunakan sungai sebagai tempat kebutuhan mereka sehari-hari, misalnya pencari pasir dan peternak; (3) perubahan warna air pada sumur milik penduduk di sekitar perusahaan; (4) terjadinya penurunan permukaan air sumur penduduk di sekitar pabrik terutama waktu musim kemarau; (5) timbulnya bau busuk (*odor*) yang menyengat; (6) meningkatnya korosifitas/pengeroposan; (7) penurunan secara drastis hasil produksi pertanian dari petani yang lahannya dialiri limbah cair dari perusahaan. Masalah tersebut sejak tahun 1992 sudah sering dilakukan upaya penyelesaian. Tetapi hasilnya tidak memuaskan bagi sebagian masyarakat. Kemudian akibat kejengkelan yang banyak dirasakan oleh sebagian warga masyarakat di sekitar perusahaan, atas hasil dari upaya yang dilaksanakan tersebut maka pada tanggal 14 Oktober 1997 sebagian penduduk yang lahan pertaniannya dialiri limbah cair dari PT IACI melakukan tindakan pemotongan pipa aliran limbah secara paksa. Peristiwa ini kemudian membuka jalan bagi kedua pihak untuk berdialog.

## 2. Sengketa lingkungan antara PT Palur Raya dengan sebagian Masyarakat Desa Ngringo yang tergabung dalam Konsorsium Korban Limbah PT Palur Raya (KKL) pada tahun 2000-2002

PT Palur Raya merupakan salah satu perusahaan yang berada di wilayah Desa Ngringo. Perusahaan ini berada di Jalan raya Solo – Sragen Km 6,3 tepatnya di Dusun Palur Desa Ngringo, mulai berproduksi sekitar November tahun 1987. Bidang usaha dari industri tersebut adalah memproduksi *glutamic acid monosodium glutamate* (bahan pembuat penyedap rasa). Perusahaan ini adalah salah satu dari delapan perusahaan penghasil bahan penyedap rasa di Indonesia dan satu-satunya perusahaan yang modalnya dimiliki pengusaha nasional murni. Sengketa lingkungan yang terjadi disebabkan oleh adanya dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pencemaran dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan PT Palur Raya. Hal ini menurut masyarakat di sekitar perusahaan telah terjadi semenjak kira-kira tahun 1989.

Dugaan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tersebut oleh sebagian masyarakat dibuktikan dengan: (1) air sumur penduduk mengalami kekeringan hingga kedalaman 20 M; (2) hasil panen pertanian yang merosot tajam baik dari segi kualitas maupun kuantitas terutama di sebelah barat pabrik/tempat pembuangan limbah padat; (3) tanah mengalami kerusakan akibat resapan limbah padat dan cair yang dibuang oleh PT. Palur Raya; (4) sungai mengalami pendangkalan akibat kandungan dalam limbah cair dan padat (kandungan TSS-nya yang tinggi). Akibatnya pencemaran yang disebabkan limbah cair tersebut biota air yang hidup di sungai Ngringo banyak yang mati/punah, seperti ikan, katak dan bulus; (5) kualitas udara di

sekitar pabrik sangat buruk. Hal ini didukung dari data kesehatan 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah penderita gangguan saluran pernafasan; (6) bau (*odor*) akibat pembuangan limbah padat menimbulkan gangguan kenyamanan pada masyarakat di sekitar pabrik; (7) seringnya terjadi kerusakan jalan umum yang membelah pabrik, akibat lalu lalang truk-truk yang mengangkut barang yang keluar masuk PT. Palur Raya.

## F. Bentuk Penyelesaian sengketa dan pengembangannya

### 1. Sengketa lingkungan antara PT IACI *versus* sebagian masyarakat petani di desa Sroyo dan Kemiri pada tahun 1999-2000

Upaya penyelesaian sengketa yang terjadi yaitu dengan pembentukan Tim Pengendalian Limbah PT Indo Acidatama Chemical Industry. Tim ini beranggotakan sembilan orang dan dikenal dengan Tim Sembilan (Tim-9), Anggota-anggotanya mewakili pihak perusahaan, pihak korban (masyarakat) dan pihak ketiga (netral), yaitu: Budi Moeljono (Direktur Utama PT IACI – Anggota);

- a. Ir. Edy Darmawan, MM (*Corporate Secretary* PT IACI – Sekretaris);
- b. DR. Mintarsih, MM. (PT IACI – Anggota);
- c. Drs. Alim Sukarno (Masyarakat – Anggota);
- d. Waluyo, SH (Masyarakat – Wakil Ketua);
- e. Sugiyanto (Masyarakat – Anggota);
- f. Drs. KRTMH. Sri Sadoyo Harjomigoeno, MM (APINDO - Ketua);
- g. Drs. Hari Mulyadi (LPTP – Anggota); dan
- h. Drs. Margito, MM (Pemerintah – Anggota).

Maksud dari pembentukan tim ini adalah untuk menjembatani permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara perusahaan dan masyarakat. Selanjutnya tim ini memberikan solusi yang sifatnya

rekomendasi ke perusahaan dan mengontrolnya bila perlu. Langkah yang dilakukan Tim-9 ini adalah melakukan sosialisasi dan mengumpulkan (inventarisasi) permasalahan yang dialami dan dikeluhkan masyarakat di sekitar perusahaan. Beberapa hasil dari inventarisasi masalah ini adalah sebagai berikut.

- a. keruhnya (warna coklat pekat) air sungai Sroyo sebagai jalur menuju sungai Bengawan Solo di mana outlet limbah cair perusahaan berada;
- b. adanya/timbulnya gejala gatal-gatal yang dirasakan oleh sebagian masyarakat yang menggunakan sungai sebagai tempat kebutuhan mereka sehari-hari, misalnya pencari pasir dan peternak;
- c. adanya perubahan warna air pada sumur milik penduduk di sekitar perusahaan;
- d. terjadinya penurunan permukaan air sumur penduduk di sekitar pabrik terutama waktu musim kemarau;
- e. timbulnya bau busuk (*odor*) yang menyengat pada saat-saat tertentu. Akibat dari bau tersebut tidak jarang warga yang tidak terbiasa mengakibatkan perut mual dan sesak sesaat;
- f. meningkatnya korosifitas/pengeroposan pada bahan-bahan rumah tangga yang terbuat dari bahan logam, seperti: atap seng, pagar besi, antena TV dan peralatan lainnya;
- g. penurunan secara drastis hasil produksi pertanian dari petani yang lahannya dialiri limbah cair dari perusahaan;
- h. Akibat dari hal tersebut (No 7) maka para petani mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada perusahaan; dan
- i. Perlunya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan (Waluyo, 2000: 45)



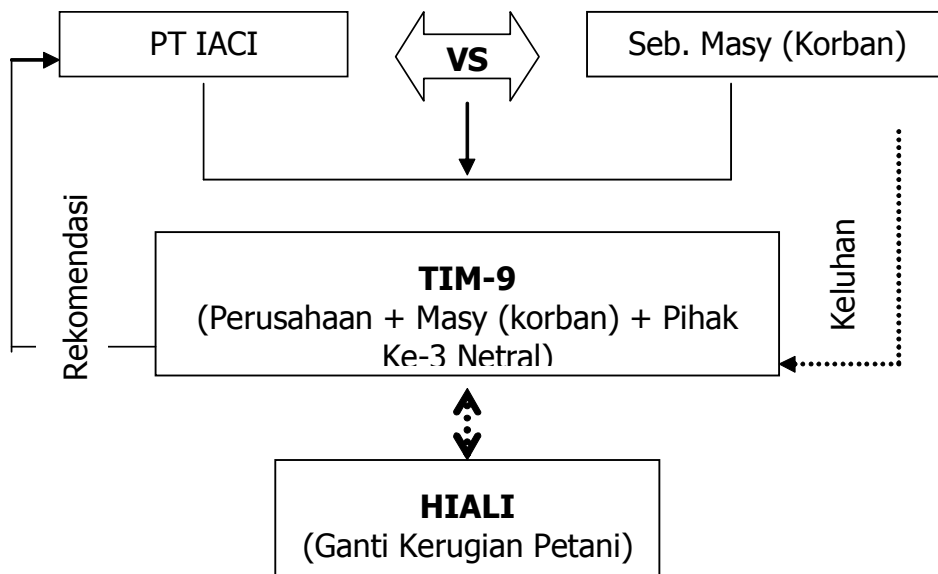
Berdasarkan masukan dari masyarakat tersebut maka Tim-9 merekomendasikan kepada perusahaan untuk :

- Melakukan penelitian kualitas dan mutu lingkungan, terhadap: udara, air sungai dan air sumur penduduk;
- Melakukan cek kesehatan atas beberapa warga yang mengeluh adanya gangguan kesehatan akibat odor dari perusahaan;
- Memberikan jaring pengaman sosial (*social safety net*) kepada masyarakat di sekitarnya, berupa: pelayanan kesehatan gratis, pemberian bantuan bea siswa, bantuan sembako dan lain-lain.
- Meningkatkan partisipasi dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat (*community develop-*

*ment*) kepada masyarakat sekitar; dan

- Menindaklanjuti tuntutan ganti rugi atas lahan petani yang dialiri limbah perusahaan. Dalam rangka ini, maka dipertemukan secara langsung kelompok petani dengan perusahaan untuk bernegosiasi (tim sebagai fasilitator), menyerahkan penyelesaian perhitungan ganti rugi kepada HIALI (Himpunan Ahli Lingkungan) Surakarta dan membantu penyelesaian pembayaran ganti kerugian yang telah disepakati.

Mengenai bentuk penyelesaian Sengketa lingkungan antara PT Indo Acidatama Chemical Industry (PT IACI) yang berada di Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat *versus* sebagian masyarakat tersebut dapat dibuat suatu bagan sebagai berikut.



## 2. Sengketa lingkungan antara PT Palur Raya dengan sebagian Masyarakat Desa Ngringo yang tergabung dalam Konsorsium Korban Limbah (KKL) PT Palur Raya

Upaya dan bentuk penyelesaian yang pernah ditempuh dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dikelompokkan menjadi: (1) Upaya penyelesaian sepihak;

(2) Penyelesaian yang dikelola sendiri; dan  
(3) Penyelesaian secara Normatif Yuridis. Upaya penyelesaian sepihak dan yang dikelola sendiri dilakukan hingga pada tahun 1998. Hal ini dilakukan lebih merupakan upaya persuasif guna mendapatkan perhatian dari berbagai pihak atas permasalahan yang dihadapi. Menurut Hardono meskipun tidak

mendapatkan hasil yang memuaskan, namun paling tidak telah membuka perhatian dari berbagai pihak termasuk pemerintah pusat.

Penyelesaian normatif yuridis adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang didasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Bentuk dari upaya ini adalah dilakukannya perundingan-perundingan bersama guna mencapai kesepakatan. Pertimbangan ditempuhnya upaya penyelesaian ini adalah dorongan dari kalangan LSM dan Pemerintah (*terutama dengan*: terbitnya Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup tanggal 23 Juni 2000 Nomor: B1205/MENLH/6/2000, perihal Perundingan Kasus PT Palur Raya) yang menganjurkan untuk menggunakan mekanisme dan prinsip kensesualisme.

Dengan difasilitasi oleh Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Karanganyar dan seorang mediator yaitu Ir. Agus Gunawan Wibisono (LPTP) disepakatilah suatu Kesepakatan Mediasi antara PT Palur Raya dengan Konsorsium Korban Limbah (KKL) PT Palur Raya pada tanggal 22 Juli 2000 (Lihat: Waluyo, 2002: 135-140).

Sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Mediasi tersebut dibentuklah suatu Tim Independen dengan keanggotaan dan bidang tugas sebagai berikut.

- a. Dr. Eko Sugiharto (air, udara dan limbah padat);
- b. Dr. Ir. Rachman Sutanto, MSc. (tanah / Ilmu Tanah);
- c. Dr. Doeljachman Moeljohardjo, MPH, MScPH. (Koordinator Tim-kesehatan masyarakat);
- d. Dr. Setyo Sarwanto Moersidik, DEA. (Hidrologi);
- e. Drs. Widodo W. Sambodo *selanjutnya diganti oleh Nugroho Widiarto, ST. MSi.* (Ekonomi Lingkungan);

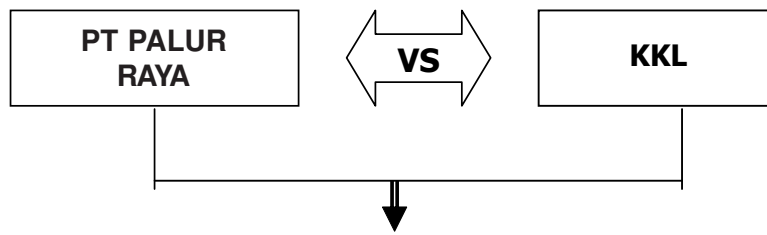
- f. Ari Suseta, SH *selanjutnya diganti Heru Setiyadi, SH.* (Hukum).

Maksud dan tujuan dari penelitian tersebut adalah :

- (1) membuktikan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- (2) menghitung besaran pencemaran dan/atau kerusakan yang terjadi;
- (3) menemukan sumber-sumber pencemaran;
- (4) menghitung ganti kerugian yang timbul;
- (5) merekomendasikan, mencari solusi untuk pelaksanaan industri bersih lingkungan dan pengembangan/pemberdayaan masyarakat (*Community Development*).

Tim Independen melakukan tugas sejak disepakatinya tugas masing-masing dan melaporkannya kepada para pihak yaitu PT. Palur Raya, Konsorsium Korban Limbah (KKL) PT. Palur Raya dan BAPEDALDA Karanganyar. Hasil penelitian dari tim independen ini dilaporkan pada tanggal 19 Maret 2001. Dalam perjalanannya tidak/belum semua hasil dari penelitian dapat dilaksanakan. Hal yang sangat sulit untuk dieksekusi adalah berkaitan dengan uang ganti kerugian. Di samping jumlahnya yang tidak sesuai dengan rekomendasi dari hasil penelitian juga waktunya yang molor hingga tahun 2003. Dari jumlah rekomendasi tim independent Rp 7.299.569.706,00, PT Palur Raya hanya mampu/sanggup membayar Rp 1.100.000.000,00 berdasarkan Kesepakatan tanggal 1 April 2002. Kemudian penggunaan uang ini didasarkan pada kesepakatan Rembug Desa Ngringo tanggal 20 Februari 2003.

Mengenai sejarah dan perjalanan sengketa lingkungan antara PT Palur Raya *versus* KKL tersebut dapat dibuat bagan sebagai berikut.



## G. Simpulan

1. Penyebab terjadinya sengketa lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Karanganyar adalah adanya dugaan telah terjadinya pencemaran lingkungan sebagai akibat dari telah beroperasinya suatu perusahaan.
2. Upaya/bentuk penyelesaian yang diterapkan terhadap sengketa lingkungan yang terjadi di wilayah Kabupaten Karanganyar adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan pengembangan sebagai berikut:
  - a. Untuk kasus sengketa lingkungan antara PT IACI *versus* sebagian masyarakat petani di desa Sroyo dan Kemiri pada tahun 1999-2000 diselesaikan dengan dibentuknya Tim Penanggulangan Limbah PT IACI (Tim-9). Tim ini terdiri dari unsur Perusahaan, Masyarakat/korban dan pihak Netral.
  - b. Untuk kasus sengketa lingkungan antara PT Palur Raya *versus* sebagian masyarakat Desa Ngringo yang tergabung dalam Konsorsium Korban Limbah (KKL) PT Palur Raya pada tahun 2000-2003 adalah

Mediasi dengan Kesepakatan Mediasi tanggal 22 Juli 2000, kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Independen.

## H. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi secara intensif peraturan-peraturan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, supaya masyarakat umum dapat memahaminya lebih dalam.
2. Perlu dioptimalkan peran pemerintah dalam memfasilitasi dan ikut mendorong para pihak yang terlibat dalam sengketa lingkungan untuk penyelesaian yang ideal. Mengingat motivasi dan urgensi pemerintah sangat mempengaruhi serta menentukan tingkat keterlibatan para pihak.
3. Meskipun kasus sengketa lingkungan yang terjadi belum dapat diselesaikan secara efektif melalui mekanisme di luar pengadilan (mediasi), namun sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa mediasi harus terus dikembangkan. Apalagi menyangkut sengketa yang bersifat polisentrik yaitu sengketa yang melibatkan banyak pihak dan persoalan seperti sengketa lingkungan hidup.



## I. DAFTAR PUSTAKA

- Garry Goodpaster. 1997. *Negosiasi dan Mediasi (Sebuah Pedoman Negosiasi dan penyelesaian sengketa Melalui Negosiasi)*. Jakarta: Elips Project.
- Harun M. Husein. 1993. *Hukum Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Bina Aksara.
- HB. Soetopo. 1997. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Joni Emirzon. 2001. *Alternatif Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lexy J. Moleong. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Magnis Suseno F. 1984. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Filsafat tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Mas Ahmad Santosa. 1997. *Mediasi Lingkungan di Indonesia; Sebuah Pengalaman*. Jakarta: ICEL.
- Munir Fuady. 2000. *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ratri Nugroho. 2003. Studi Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup antara PT Palur Raya dengan Sebagian Masyarakat Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum UNS.
- Sudharto Hadi P. 2000. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, *Seminar Sosialisasi PP No. 54 Tahun 2000, Kerjasama antara PSLH-Lemlit UNS dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan UNU Surakarta, 25 September 2000*.
- Sukma Violetta. 2000. Penyelesaian Sengketa Secara Musyawarah (ADR) Belajar dari Pengalaman Negara-Negara Lain. *Seminar Sosialisasi PP No. 54 Tahun 2000, Kerjasama antara PSLH-Lemlit UNS dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan UNU Surakarta, 25 September 2000*.
- Suparto Wijoyo. 1999. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Waluyo. 2000. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Studi Kasus di PT Indo Acidatama Chemical Industry)*. Surakarta: Fakultas Hukum UNS.
- . 2002. Upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Studi Kasus di PT Palur Raya Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar). *Tesis*. Surakarta: Program Studi Ilmu Lingkungan Pascasarjana UNS.